

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan Terjemahannya, (2019), Edisi Penyempurnaan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

B. Buku

- A. Abdurrachman, (2014), *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, Jakarta, PT. Pradya Paramitya.
- Abdul Ghofur Anshori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Achdiana Yuni Lestari & Endang Heriyani, (2009). *Dasar-dasar Pembuktian Kontrak dan Akad*, Yogyakarta, Macromedia.
- Ali Achmad Chomzah, (2003), *Hukum Pertanahan, Pemberian Hak Atas Tanah, Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta, Pustaka Nasional.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Djaja S. Meliala, (1997), *Pemberi Kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Tarsito.
- Effendi Perangin, (1991). *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Jakarta, Rajawali Pers.
- E. Utrecht, (1959), *Pengertian dalam Hukum Indonesia*. Cet. Ke-6, Jakarta, Balai Buku Ichtiar.
- Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. (2020). *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister (S-2) Kenotariatan (M.Kn)*, Semarang.
- Gatot Supramono, (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- _____, (2000), *Perbankan Dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Gustav Radbruch, (1961), *Einfuehrung in Die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, Koehler Verlag.
- Habib Adjie. (2014). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama.
- Hasbullah Frieda Husni, (2005). *Hukum Kebendaan Perdata*, Jakarta, Ind-hill-Co.
- Hendi Suhendi, (2010), *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Henny Tanuwidjaja, (2012). *Pranata Hukum Jaminan Utang Dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*, Bandung, Refika Aditama.
- Herlien Budiono. (2015). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* Buku Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Indrohato. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Bakti, Bandung: Citra Aditya.
- John Salindeho, (1988) *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.
- J.Satrio, (1998). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, (2005), *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*, Jakarta, Prenada Media.
- Lexy J. Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lumban Tobing. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga
- M. Syamsudin, (2007) *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyoto, Dr, SH, M.Kn, (2019). *Pertanggung Jawaban Notaris-PPAT Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Mustofa. (2014). *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*. Yogyakarta: Karya Media
- Ngadino, Dr. SH. MH. (2019). *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press
- Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philippus M. Hadjon (2001). *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Putri A.R, (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, cet. 1, Medan: Sofmedia.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, (2009). *Hukum Jaminan*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP.
- Salim HS. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sartono Kartodirdjo (1983) *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Satjipto Rahardjo. (2012). *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti

- Sayyid Sabiq, (1987), *Fikih Sunnah*, Jilid 12, alih bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, cet. XII, Bandung: PT Alma'arif.
- Sjaifurrachman,(2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soegondo Notodisoerjo. (1993). *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, (2002). *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamadji, (2009), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1984) *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet ke XVIII. Jakarta, PT. Intermesa.
- Sudargo Gautama, (1973). *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Sudikno Mertokusumo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sujdarwo. (2011) *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju
- Sutan Remy Sjahdeni, (1996). *Hak Tanggungan: Asas-Asas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah-Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Syamsir, Torang. (2014) *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Than Thong Kie. (2007). *Studi Notariat, Serba serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Wahbah Zuhaily, (1999) *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Fiqh Muamalah Perbankan Syariah)*, Jakarta, Bank Muamalat Indonesia.
- Wangsawidjaja, (2012), *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Widhi Handoko, Dr. SH, S.pN, (2019), *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, Bogor: Roda Publikasi Kreasi.

C. Jurnal

- Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2000. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Dimas Agung Prastomo, Akhmad Khisni, Akibat Hukum Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Notaris, *Jurnal Akta*, vol. 4, No.4 Desember, 2017. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/viewFile/2519/1881>.

- Made Oka Cahyadi Wiguna. "Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Pengaruhnya Terhadap Pemenuhan Asas Publisitas Dalam Proses Pemberian Hak Tanggungan" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2 (2015). hal. 6. Url. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/issue/view/65>.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, Juli 2019. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido>.
- Maryanto, Pengaruh Filsafat Positivisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wacana Hukum*. Vol 11, No 1 (2012). Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/727>.
- Muarif, Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengikatan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Musyarakah Di PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 3, No.1, <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/933>
- Muhammad Wildan, dkk, Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat, *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, Mei 2020, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, DOI: 10.24905/diktum.v8i1.73
- Rachmadi Usman, Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Dengan Akta, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.3 - November 2018*
- R. Arry Mth. Soekowathy, (2003), Fungsi Dan Relevansi Filsafat Hukum Bagi Rasa Keadilan Dalam Hukum Positif, *Jurnal Filsafat*. Jilid 35, Nomor 3, Desember 2003.
- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Sayuna, Inche, "Problematika Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Dari Dimensi: Subjek, Objek dan Kepentingan Yuridis", *Jurnal Reportorium Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2014*. Url. <https://www.neliti.com/id/publications/212960/>

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang Undang Nomor. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Republik Indonesia (Perkaban) No. 8 Tahun 2012.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu.

E. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/tanah>, diakses tanggal 22 Maret 2021, Pkl. 10.20 WIB.

Ray pratama, *Pengertian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan*, <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-surat-kuasa-membebankan-hak.html>, diakses 2 Juli 2021, Pukul 20.00 WIB.

Soska Zone, *Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)*, <https://hasyimsoska.blogspot.com/2011/02/surat-kuasa-membebankan-hak-tanggung.html>. Diakses 5 Juli 2021, Pukul 10.00 WIB.